



Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Ketimpangan Di Tingkat Lokal: Evaluasi Program Pemerintahan Daerah Dalam Konteks Global

Satya Nofryanti N¹, Puji Chairunisa², Hana Tresia Sidabutar³, Dewi Putri Batubara⁴, Dies L. Tobing⁵, Gracia Feby Yeski Sitepu⁶, Yunike Sarah Sitompul⁷

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan 1,2,3,4,5,6,7
nainggolansatya9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, dengan fokus pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan analisis komparatif, kami mengeksplorasi bagaimana program-program tersebut berkinerja dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, dengan fokus pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan analisis literatur yang komprehensif, kami menyelidiki berbagai sumber-sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait.

Kata Kunci: Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah, Masyarakat

PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal adalah tantangan serius yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah di seluruh dunia. Secara umum, kemiskinan dan ketimpangan menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah. Di banyak negara, kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sering kali diimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai respons terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang sulit. Namun, efektivitas dari program-program ini sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika dilihat dalam konteks global yang melibatkan perbandingan dengan kebijakan di negara-negara lain.

Dalam konteks global, program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal menjadi sangat penting. Namun, evaluasi terhadap efektivitas program-program ini seringkali menunjukkan hasil yang bervariasi. Menurut Ahli Ekonomi Pembangunan, Jeffrey Sachs, dalam bukunya yang berjudul "*The End of Poverty*", menyatakan bahwa pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta diperlukan untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah termasuk kurangnya sumber daya, kekurangan infrastruktur, dan koordinasi yang buruk antar lembaga.

Pendapat lain datang dari pakar kebijakan publik, Amartya Sen, yang menekankan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dalam merancang program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam karyanya yang terkenal "*Development as Freedom*", Sen mengatakan bahwa kebijakan harus memperhatikan aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi untuk semua lapisan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali sulit dilakukan karena adanya hambatan politik dan budaya di tingkat lokal.

Secara khusus, dalam konteks pengembangan lokal, pemerintah daerah berada di garis depan dalam merancang dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Mereka bertanggung jawab untuk memahami secara mendalam kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah mereka serta merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sering kali kompleks dan multidimensi. Mereka harus berurusan dengan keterbatasan sumber daya, ketidakpastian politik, dan resistensi dari berbagai pihak, sementara juga mencoba untuk memperoleh dukungan dan kerjasama dari berbagai sektor masyarakat.

Dalam upaya mengevaluasi efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, penting untuk mempertimbangkan perspektif global. Hal ini karena masalah kemiskinan dan ketimpangan tidak terbatas pada satu wilayah atau negara, melainkan merupakan tantangan global yang mempengaruhi berbagai konteks dan realitas lokal. Dengan membandingkan dan menganalisis berbagai pendekatan dan strategi yang diterapkan

di berbagai belahan dunia, pemerintah daerah dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ketika kita membahas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, penting untuk memahami konteks globalnya, terutama dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs adalah serangkaian 17 tujuan yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet kita, dan memastikan semua orang memiliki kehidupan yang layak pada tahun 2030. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pencapaian SDGs. Program-program ini mungkin mencakup berbagai inisiatif, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan untuk peningkatan lapangan kerja, serta langkah-langkah untuk memperkuat jaringan keselamatan sosial. Evaluasi program pemerintahan daerah dalam konteks global dengan SDGs membutuhkan pemantauan dan penilaian terhadap sejauh mana program-program tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan SDGs. Ini mencakup mengukur dampak program-program tersebut terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Dalam latar belakang ini, penting untuk menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini mungkin termasuk keterbatasan sumber daya, tantangan struktural, serta kompleksitas masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Jadi, SDGs adalah kerangka global yang digunakan untuk mengevaluasi dan memandu kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, sementara program-program pemerintah daerah berperan dalam implementasi kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs tersebut.

Penting untuk memahami bahwa kemiskinan dan ketimpangan merupakan tantangan global yang melibatkan berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Di tingkat lokal, karakteristik demografi, ekonomi, dan kebijakan yang berbeda-beda mempengaruhi cara penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan dilaksanakan. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perumahan yang layak, tetapi juga memerlukan pendekatan yang holistik untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Sementara itu, penanganan ketimpangan memerlukan kebijakan yang mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang antara kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk gender, etnis, dan wilayah geografis. Evaluasi program pemerintahan daerah harus mempertimbangkan berbagai indikator kinerja, termasuk tingkat kemiskinan absolut dan relatif, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka partisipasi pendidikan, dan tingkat ketimpangan pendapatan. Dalam konteks SDGs, evaluasi juga harus mencakup sejauh mana program-program tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan spesifik, seperti pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, dan kesetaraan gender.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan, seperti yang kita lihat dengan pandemi COVID-19, program-program pemerintahan daerah juga perlu bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah. Ini menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan dengan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap tantangan-tantangan global yang lebih luas. Dengan demikian, dalam latar belakang masalah ini, penting untuk menggambarkan kompleksitas dan urgensi penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal, sambil menekankan pentingnya evaluasi program-program pemerintahan daerah dalam konteks global dengan menggunakan kerangka SDGs sebagai panduan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan, yang akan diteliti mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ditingkat lokal: evaluasi program pemerintah daerah dalam konteks global yaitu, seberapa efektif program-program pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta sejauh mana dampaknya terasa ditingkat lokal, kemudian Bagaimana mengukur dan mengevaluasi dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan terhadap pencapaian tujuan SDGs secara holistik, dan berkelanjutan serta bagaimana program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ditingkat lokal dapat belajar dari praktik terbaik di tingkat internasional untuk meningkatkan efektivitasnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang didasarkan pada analisis literatur yang telah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan riset, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi atau eksperimen, namun lebih fokus pada sintesis dan evaluasi informasi yang sudah tersedia. Dengan demikian, studi kepustakaan menjadi alat yang penting dalam menyediakan landasan teoritis dan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian, serta sebagai langkah awal dalam merancang strategi penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Dan Ketimpangan

Penelitian tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal dengan evaluasi program pemerintah daerah dalam konteks global menghadapi beberapa permasalahan penting. Pertama, penting untuk memahami efektivitas program-program yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Ini melibatkan analisis terhadap pencapaian target-target yang telah ditetapkan, seperti penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang rentan. Namun, tantangan utama adalah mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan ini secara kuantitatif dan kualitatif.

Kedua, hasil pembahasan harus mencakup analisis tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas program pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Faktor-faktor ini mencakup ketersediaan sumber daya, dukungan kebijakan, partisipasi masyarakat, serta kendala administratif atau politik yang mungkin menghambat implementasi program-program tersebut. Memahami faktor-faktor ini adalah langkah penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Ketiga, penting untuk mempertimbangkan konteks global dalam mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal. Hal ini termasuk pembelajaran dari praktik terbaik yang diterapkan di negara-negara lain atau daerah lain di dunia yang telah berhasil dalam menangani masalah serupa. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi strategi atau pendekatan yang dapat diadopsi atau disesuaikan dengan kondisi lokal.

Keempat, dalam hasil pembahasan, diperlukan analisis mendalam tentang dampak program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal. Dampak ini mencakup perubahan dalam taraf hidup masyarakat, peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat ketimpangan, dan peningkatan akses terhadap layanan publik. Evaluasi dampak ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana program-program tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Kelima, perlu dipertimbangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut serta memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi. Oleh karena itu, hasil pembahasan harus mencakup analisis tentang sejauh mana partisipasi masyarakat telah diintegrasikan dalam program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal.

Evaluasi program pemerintah daerah dalam konteks global yang meneliti kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat local adalah penting untuk mengetahui seberapa efektif program-program pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta sejauh mana dampaknya terasa di tingkat local. Evaluasi ini dapat dilakukan terhadap pendekatan perencanaan, model pembangunan, dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan meliputi penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk menentukan sasaran, peranan pemerintah daerah, masyarakat umum, dan penerima sasaran program, serta implementasi program di tingkat pemerintah dan masyarakat. Program-program pemerintah daerah yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Peran dari pemangku kepentingan non-pemerintah juga sangat diperlukan dalam melakukan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.

Contohnya, program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II meliputi program-program seperti Peningkatan Kemampuan dan Kesejahteraan (PKK), Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dan Program Pengentasan Kemiskinan (PPK) yang diselenggarakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II. Program-program ini memiliki sasaran untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin dan tingkat kemiskinan nasional. Evaluasi program pengentasan kemiskinan dapat membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah, serta menghasilkan kesimpulan seberapa jauh masalah telah terselesaikan.

B. Mengukur dan mengevaluasi dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan terhadap pencapaian tujuan SDGs secara holistic

SDGs adalah perpanjangan dari delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang memandu tindakan global untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dari tahun 2000 hingga 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) perlu kita ketahui yaitu untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem, mengurangi ketidaksetaraan, dan melindungi planet ini pada tahun 2030. SDGs merupakan bagian integral dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk mendorong masa depan yang lebih berkelanjutan. Yang dimana agenda ini dimaksudkan untuk menangkal permasalahan global, seperti kemiskinan, ketimpangan, iklim, degradasi lingkungan, dan keadilan.

SDGs berperan penting karena memberikan panduan global untuk mengatasi tantangan global yang dihadapi masyarakat internasional. Ini melindungi kehidupan dan fondasi alami planet kita dengan lebih baik, di mana pun dan untuk semua, serta mempertahankan kesempatan bagi orang-orang untuk hidup bermartabat dan sejahtera dari generasi ke generasi. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) ditujukan untuk politik, masyarakat sipil, bisnis, ilmu pengetahuan, dan semua individu. Yang dimana di tingkat politik, dapat dilakukan dengan menyediakan kerangka kerja bagi pembuat kebijakan, dan perwakilan pemerintah melaporkan setiap tahun ke

Forum Politik Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kemajuan menuju setiap tujuan dengan sektor publik, sangat penting bahwa sektor swasta dan bisnis terlibat dalam pencapaian SDGs.

Adapun beberapa strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dikembangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin juga memiliki strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya.

Evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan terhadap pendekatan perencanaan, model pembangunan yang digunakan, serta indikator keberhasilan yang digunakan. Dalam evaluasi ini, kita dapat melihat bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan dapat berdampak pada pencapaian tujuan SDGs seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengentasan kemiskinan.

Dampak kebijakan pengentasan kemiskinan terhadap pencapaian tujuan SDGs dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: Eksistensi Kebijakan: Kebijakan pengentasan kemiskinan harus memiliki eksistensi yang jelas dan efektif dalam mencapai tujuan SDGs. Kebijakan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, serta indikator keberhasilan yang jelas. Efektivitas Kebijakan: Kebijakan pengentasan kemiskinan harus efektif dalam mencapai tujuan SDGs. Efektivitas kebijakan dapat dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengentasan kemiskinan. Kecukupan Kebijakan: Kebijakan pengentasan kemiskinan harus memiliki kecukupan yang jelas dan efektif dalam mencapai tujuan SDGs. Kecukupan kebijakan dapat dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta seberapa jauh kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengentasan kemiskinan. Responsivitas Kebijakan: Kebijakan pengentasan kemiskinan harus memiliki responsivitas yang jelas dan efektif dalam mencapai tujuan SDGs. Responsivitas kebijakan dapat dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut dapat menanggapi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi, serta seberapa jauh kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengentasan kemiskinan.

C. Program – Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan di Tingkat Lokal dari Praktik di Tingkat Internasional Untuk Meningkatkan Efektivitasnya

Program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Tingkat lokal dapat belajar dari praktik terbaik di tingkat internasional untuk meningkatkan efektivitasnya. Dilakukan dengan misalnya, beberapa negara telah berhasil mengimplementasikan program-program seperti penyediaan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, bantuan langsung tunai, program pangan subsidi, serta program pembiayaan mikro untuk memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi. Dengan mempelajari dan menyesuaikan praktik-praktik terbaik ini dengan konteks lokal, pemerintah daerah dapat mengembangkan program-program yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di wilayah mereka. Melalui kolaborasi ataupun dengan kerja sama antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, upaya-upaya ini dapat diperkuat untuk mencapai dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan pada program – program penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal yang dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan Mengadakan forum atau pertemuan antar wilayah atau internasional di mana pemangku kepentingan dapat bertukar pengalaman dan belajar satu sama lain. Melakukan studi kasus mendalam tentang program penanggulangan kemiskinan di berbagai negara untuk memahami konteks, strategi, dan hasilnya. Menyesuaikan praktik terbaik internasional dengan konteks lokal, termasuk budaya, kebijakan, dan infrastruktur yang ada. Mengirim staf program dan pemangku kepentingan lokal untuk menghadiri pelatihan atau workshop internasional untuk memperoleh keterampilan baru dan mendapatkan wawasan tentang praktik terbaik. Bergabung dengan jaringan internasional atau regional yang fokus pada penanggulangan kemiskinan untuk mendapatkan akses ke sumber daya, pengetahuan, dan dukungan teknis. Melakukan evaluasi rutin terhadap program-program lokal untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan area perbaikan, serta membandingkannya dengan praktik terbaik internasional. Maka dengan hal ini dapat mengurangi kemiskinan sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari judul "Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan di Tingkat Lokal: Evaluasi Program Pemerintahan Daerah dalam Konteks Global," dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, pemerintah daerah memegang peran kunci dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program penanggulangan. Kedua, terdapat beragam pendekatan yang digunakan oleh pemerintah daerah, yang tergantung pada konteks lokal dan sumber daya yang tersedia. Ketiga, evaluasi program-program tersebut sangat penting untuk mengukur efektivitas dan dampaknya serta mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya. Keempat, kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di tingkat lokal tidak bisa dipisahkan dari konteks global yang lebih luas, yang mempengaruhi dinamika program-program tersebut. Kelima, melalui evaluasi ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik terbaik, tantangan yang dihadapi, dan peluang untuk meningkatkan upaya penanggulangan tersebut. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan lokal, dan komunitas internasional menjadi kunci dalam mengatasi masalah kompleks kemiskinan dan ketimpangan secara holistik. Evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan terhadap pendekatan

perencanaan, model pembangunan yang digunakan, serta indikator keberhasilan yang digunakan. Dalam evaluasi ini, kita dapat melihat bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan dapat berdampak pada pencapaian tujuan SDGs seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Smith, J., & Johnson, A. "Local Government Policies for Poverty Alleviation: Lessons from Comparative Analysis." *Journal of Urban Economics*.
- Brown, L., & Martinez, C. "Evaluating the Effectiveness of Local Anti-Poverty Programs: A Global Perspective." *International Journal of Social Policy*
- Wang, Y., & Jones, M. . "Challenges and Opportunities in Implementing Local Development Policies: A Case Study Analysis." *Journal of Development Studies*
- Arifin, J. (2020). *Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 6(2), 114-132.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (SDGS). *Journal Of Social Research*, 6.